



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR188-401.040/5/2021**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota Madiun telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk dibahas guna mendapat persetujuan bersama untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Walikota Madiun tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Madiun tanggal 15 Maret 2021 Nomor 170/488/401.040/2021 Perihal Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kota Madiun;
 2. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Madiun tanggal 22 Maret 2021 Nomor 900/857/401.202/ 2021 perihal Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
 3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 30 Maret 2021 dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Walikota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;

4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 16 April 2021 dengan acara Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 19 April 2021 dengan acara Penyampaian Jawaban Walikota Madiun terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
6. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 20 April 2021 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Dengan Keputusan ini menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Sebagaimana Diktum “KESATU” agar Walikota Madiun menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat evaluasi.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 20 April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.